

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alden, J., Dan Morgan, R 1974. *Regional Planning: A Comprehensive View*, Bath, Pitmann Press.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*, (Second ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi
- Arikunto, Suharsini. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta
- Burhan, Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chelimsky, Elanor. 1989. *Program Evaluation: Pattern and Directions, 2nd Edition*. Washington, DC; American Society for Public Administration
- Djaali, Mulyono Pudji dan Ramly. 200. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta
- Aksara Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Englewood Chief, New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis An Integrated Approach*. New York: Routledge, 2018.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). *The Public and its Policies*. New York: Oxford University Press.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lewis, Carol W. & Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Fransisco: JosseyBass.
- Nugroho, Riant. 2008. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rakhmawati, Rosidah. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Cet. Kedua . Malang: Banyumedia Publishing.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. B

- andung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- UN-HABITAT. (2004). Pro-poor Land Management Integrating Slums into city planning approaches. Nairobi.
- UN-HABITAT. (2007a). How to develop a pro poor land policy. Nairobi.
- UN-HABITAT. (2009b). Pro-poor land and housing. Paper presented at the International tripartite conference on urbanization challenges and poverty reduction in African, Caribbean and Pacific countries, Nairobi.
- UN-HABITAT (2016c). The New Urban Agenda. The United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III). Quito.
- Wahyudi, A. 2016. Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105.
- Wirnano, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

- Assegaf, Muhammad I. F., Henny, J., & Nabitatus, S. (2019). Pelaksanaan *Online Single Submission* dalam rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Jurnal*, 8(2): 1328-1342.
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurnal Jurist-Diction*, 2(5): 1631- 1654.
- Crisandyna, Made K.T., I Nyoman, S., & Desak Gede, D. A. (2020). Aspek Perizinan dalam Pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem Online Submission. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1): 118-123.
- Damayanti, S. N. 2017. Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal unair*, 1(1):5-7.
- Fadhilah, A.N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS) studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Publika*, 7(4).
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2): 21-34.
- Kasma, Abdullah. 2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance. *Jurnal Meritokrasi*, 1(1): 65.
- Krueckeberg, D. A. (1995). The difficult character of property: to whom do things belong? *Journal of the American Planning Association*, 61(3): 301-309.
- Leaf, M. (1993). Land rights for residential development in Jakarta, Indonesia: the colonial roots of contemporary urban dualism. *International Journal of Urban and Regional Research*, 17(4): 477-491.
- Mayasari, Ima. 2019. Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3): 407-410.
- Mthethwa, R. M. 2012. Critical Dimensions for Policy Implementation. *African Journal of Public Affairs*, 5(2): 36–47.

- Prianto, A. L. 2011. *Good Governance* dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Jurnal Otoritas: Ilmu Pemerintah*, 1(1):1-10.
- Ramdhani, A., & Muhammad A. R. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1):1-12.
- Robby, U. B., & Tarwini, W.,. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission (OSS): Studi pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2): 51-57.
- Roy, A. (2005). Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning. *Journal of the American Planning Association*, 71(2): 147-158. doi: 10.1080/01944360508976689
- Sanjoyo, S., Sapriani, Agus, S., & Salma, S. (2020). Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagai Ketaatan Hukum dalam rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review Journal*, 4(1): 64-78.
- Solikhah, M., & Bhirawa, S. W. S. (2019). Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Kediri. *Jurnal Seminar Nasional Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (SENMEA) IV*, 1(1): 316-320.
- Suhayati, Monika. 2018. Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission). *Jurnal Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 10: 4-5.
- Wahidin, A. A. S., Sutaryono, & Rakhmat, R. (2019). Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. *Jurnal Tugas Agraria*, 2(2): 100-116.
- Windhyastiti, I., Syarif, H., Umu, K., & Abdul, W. (2019). Role of The Online Single Submission (OSS) to Increase The City Investment Attraction. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9): 214-219.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.